



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSJD SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOKO MULYONO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 221229

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.316.200.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/300 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 902.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 722 m2/176 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 172.200.000
4. Tanah Seluas 775 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 387.500.000
5. Tanah Seluas 864 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 432.000.000
6. Tanah Seluas 215 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 322.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 228.015.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.265.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 133.650.000
3. MOBIL, SUZUKI APV MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 89.100.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.806.250

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.132.416



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.550.153.666
III. HUTANG	Rp.	517.746.281
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.032.407.385

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.